



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ESTUNINGSIH
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK, DAN KEMAHasiswaan
3. NHK : 966717

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.420.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m²/120 m² di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 4.400 m²/200 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m²/180 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **342.800.000**

1. MOTOR, HONDA NC110A1C AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, NISSAN MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI LANCER SEDAN Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000



6. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
1.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	29.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	24.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.011.313.109
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.827.113.109

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.827.113.109

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.